

**KEBIJAKAN BELA BELI BUPATI HASTO WARDOYO
PERSPEKTIF NOMOKRASI ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

MUCH. KAOTSAR ASSHOFI

12370013

PEMBIMBING:

DR. H. M. NUR, S.AG., M.AG.

JURUSAN SIYASAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Kemiskinan yang dibiarkan terus-menerus mengindikasikan bahwa peran seorang pemimpin tidak ada. Masalah kemiskinan yang dialami oleh Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sudah pada kondisi buruk, yang mendorong Bupati Kulonprogo bertindak untuk mengatasi masalah tersebut dengan sejumlah terobosan berupa kebijakan *Bela Beli* Kulonprogo. Kebijakan *Bela Beli* menurut pengertiannya merupakan kebijakan berupa pernyataan publik yang bertujuan agar masyarakat mau membela daerahnya sendiri dengan cara memproduksi dan mengkonsumsi produksi daerah Kulonprogo. Namun apakah kebijakan *Bela Beli* tersebut merupakan strategi yang tepat dari pemerintah daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kulonprogo? atukah kebijakan tersebut hanya akan melahirkan segelintir elit ekonomi yang mendapat keuntungan dari kebijakan yang dibuat? Bagaimana Nomokrasi Islam melihat kebijakan itu?

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis kualitatif. Data yang penulis peroleh dianalisis dengan teori kebijakan publik dan teori Nomokrasi Islam. Hal ini dilakukan untuk menjelaskan kebijakan *Bela Beli* dan dampaknya, dalam upaya mengatasi kemiskinan.

Hasil penelitian ini adalah dampak kebijakan *Bela Beli* dari kurun waktu tahun 2013 ketika kebijakan *Bela Beli* dideklarasikan sampai tahun 2016 berdampak positif. Dampak positifnya adalah meningkatnya ekonomi masyarakat dan meningkatnya penjualan atas produksi daerah. Hal ini bisa tercapai karena proses kebijakan *Bela Beli* Kulonprogo sesuai dengan tahap-tahap kebijakan publik dan juga dengan adanya komunikasi dan *disposisi* yang baik dalam menjalankan kebijakan *Bela Beli* itu sendiri. Dari dampak positif ini pula dapat diketahui bahwa Bupati Hasto wardoyo telah mengemban amanah dan melaksanakan tujuan adanya otonomi daerah sesuai dengan konsep Nomokrasi Islam.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, *Bela Beli*, Nomokrasi Islam

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUCH. KAOTSAR ASSHOFI

NIM : 12370013

Jurusan : Siyasah

Fakultas : Syariah Dan Hukum

Menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi yang berjudul : Kebijakan *Bela Beli* Bupati Hasto Wardoyo Perspektif Nomokrasi Islam adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penulis tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penulis.



Yogyakarta, 05 juni 2016

Much. Kaotsar Asshofi
NIM: 12370013



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Much. Kaotsar Asshofi

NIM : 12370013

Judul Proposal: **Kebijakan Bela Beli Bupati Hasto Wardoyo Perspektif
Nomokrasi Islam**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Studi Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 4 Juni 2016

Pembimbing

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : Un.02/DS/PP.00.9/231/2016

Tugas Akhir dengan judul : **KEBIJAKAN BELA BELI BUPATI
HASTO WARDOYO PERSPEKTIF
NOMOKRASI ISLAM**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Much. Kaotsar Asshofi
Nomor Induk Mahasiswa : 12370013
Telah dimunaqosyahkan pada : Kamis, 16 Juni 2016
Dengan Nilai : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji I

Dr. Ocktoberinsyah, M. Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19790418 200912 2 001

Yogyakarta, 16 Juni 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syar'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- Ayahanda dan Ibunda Tercinta, H. M. Muchlish Iswono dan Hj. Sri ulfati yang selalu memberikan support dan do'a untuk penyelesaian tugas akhir ini.

MOTTO

“Menunda adalah awal dari kegagalan”



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى امور الدنيا والدين والصلاة والسلام
على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اما بعد

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, serta shalawat dan salam semoga selalu senantiasa dalam junjungan Nabi agung Muhammad SAW atas rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai kendala dan kesulitan, namun berkat dorongan dan pengarahan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada :

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas dukungannya dan yang telah memberikan ijin penelitian.
3. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan dalam skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan keikhlasan diberikan sebaik-baik balasan oleh Allah. Dengan bertambahnya kemulyaan di dunia hingga di akhirat kelak.

4. Seluruh dosen Syariah dan Hukum, khususnya Program Studi Siyasah yang telah membagikan ilmunya selama penulis belajar di Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Seluruh staff bagian akademik yang telah mengakomodir segala keperluan penulis dalam urusan akademik dari penulisan skripsi ini.
6. dr.H. Hasto Wardoyo,Sp.OG(K) selaku Bupati Kulonprogo yang telah memberikan izin dan meluangkan waktunya sebagai narasumber dalam penelitian ini.
7. Seluruh masyarakat Kulonprogo, khususnya bapak Ihsan Mawardi, bapak Sudiono, bapak Sugiono, bapak Marhaban, bapak Sukiran yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam mendapatkan informasi dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penelitian penulis.
8. Mas Syamsul munif selaku kakak tercinta yang telah memberikan dukungan dan curahan fikiran dalam diskusi judul skripsi dan teknik menggarapnya. Dan seluruh keluarga Mbak Meli dan mbak Rian selaku kakak tercinta yang telah memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi.
9. Sahabat seperjuangan Abidin latua, Rofiq afriatna, Rahma dybib, Naili Azizah dan teman-teman jurusan Siyasah lainnya yang telah membantu.
10. Susi Arum Wahyuni yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Serta rekan-rekan dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi dan do'a demi terselesaikannya skripsi ini.

Semoga semua bantuan, dorongan, do'a, saran, dan bimbingan yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 01 Juni 2016

Penulis

Much. Kaotsar Asshofi
12370013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teoritik	11
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II KEBIJAKAN DALAM NOMOKRASI ISLAM	21
A. Konsep Kebijakan Publik	21
1. Pemerintah	21

2. Bentuk Kebijakan Publik	22
3. Jenis-Jenis Kebijakan Publik.....	24
4. Tujuan Kebijakan Publik	26
B. Tahap Tahap Kebijakan	25
1. Perencanaan Kebijakan Publik	27
2. Perumusan Kebijakan Publik	31
3. Implementasi	35
4. Evaluasi Kebijakan	38
C. Konsep Kepemimpinan dalam Nomokrasi Islam	39
1. Kedaulatan (Otoritas Tertinggi)	39
2. Pengambilan Keputusan.....	40
3. Sendi Utama Pengelolaan Negara	42
4. Negara dan Masyarakat.....	44
5. Supremasi Hukum	45
6. Tujuan Negara	45
7. Ketaatan Rakyat.....	47
BAB III KEBIJAKAN BELA BELI HASTO WARDOYO SEBAGAI BUPATI KULONPROGO	48
A. Gambaran Umum Kabupaten Kulonprogo	48
1. Geografi.....	48
2. Pemerintahan	50
B. Profil Masyarakat Kulonprogo	52
1. Penduduk	52
2. Perekonomian	54
3. Laju Pertumbuhan Ekonomi	55
C. Profil Bupati Kulonprogo	58
D. Kebijakan <i>Bela Beli</i> Hasto Wardoyo	67
1. Tujuan Kebijakan <i>Bela Beli</i> Kulonprogo	68
2. Latar Belakang Kebijakan <i>Bela Beli</i> Kulonprogo.....	69

BAB IV BELA BELI DAN PERUBAHAN DAERAH MENUJU KEMAKMURAN	70
A. Tahap-Tahap Kebijakan <i>Bela Beli</i> Kulonprogo	70
1. Perumusan Kebijakan <i>Bela Beli</i>	71
2. Implementasi.....	72
B. Dampak Kebijakan <i>Bela Beli</i> Hasto Wardoyo bagi masyarakat Kulonprogo.....	82
C. Tata Kelola pemerintahan Islami	88
1. Kedaulatan	88
2. Pengambilan Keputusan	89
3. Tujuan Negara.....	91
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
C. Kata Penutup	93
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
Daftar Terjemahan.....	I
Pedoman Wawancara.....	II
Transkrip Wawancara.....	IV
Dokumentasi Penelitian	XI
Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara	XIV
Surat Permohonan Izin Penelitian	XIX
Surat Rekomendasi Penelitian.....	XXI
Surat Permohonan Wawancara	XXIII
<i>Curriculum Vitae</i>	XXIV

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Kulonprogo

Tabel 3.2 Statistik Pemerintah Kabupaten Kulonprogo

Tabel 3.3 Estimasi Jumlah Penduduk Kabupaten Kulonprogo Berdasarkan
Hasil SP2010

Tabel 3.4 Laju Pertumbuhan Industri

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Gambar 2.1 : Faktor-Faktor Implementasi

Gambar 3.1 : Peta Kulonprogo

Gambar 4.1 : Faktor Keberhasilan Kebijakan *Bela Beli* Kulonprogo

Gambar 4.2 : Faktor Terciptanya Dampak Positif Kebijakan *Bela Beli*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi merupakan salah satu faktor pembentuk negara menjadi semakin maju, di mana suatu negara akan menjadi negara maju maka harus memiliki ekonomi yang baik.¹ Di Indonesia sendiri sebagai negara berkembang dalam hal ekonomi juga sedang mengalami perkembangan. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015 perkembangan ekonomi jatuh pada level 4,79 persen. Hal ini menurut kepala BPS mengalami penurunan, yang mana pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu tumbuh pada angka 5,02 persen. Faktor penyebabnya tidak lain karena menurunnya pertumbuhan ekonomi global. Akan tetapi jika dihitung secara kuartalan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2015 tercatat 5,04 persen secara *year on year* (YoY). Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2015 ini meningkat dari kuartal IV 2014 sebesar 5,01 persen.²

Faktor meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara kuartalan menurut pengamat ekonomi Agustar Radjali adalah adanya konsumsi domestik yang menjadikan sumber utama pertumbuhan ekonomi di 2015 ketika ekspor sulit diandalkan karena penurunan drastis harga komoditas dan penurunan permintaan

¹ Widyahartono, *BELAJAR DARI JEPANG: Keberhasilan Sebagai Negara Industri Asia* (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hlm. 33.

² “Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2015 tumbuh 5,04 persen tertinggi selama tahun 2015,” <http://www.bps.go.id/index.php/brs/1267>, akses pada tanggal 25-2-2016.

dari negara lain, termasuk China. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa di angka 5,3 persen. Namun menurut Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) lebih optimistis dari pemerintah. Organisasi para pengusaha ini memperkirakan ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5,5 persen dengan pertimbangan atas perkembangan ekonomi global maupun reformasi ekonomi dalam negeri yang telah menunjukkan tanda-tanda perbaikan.³

Tanda-tanda perbaikan ekonomi Indonesia salah satunya dapat dilihat pada Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di mana terdapat sejumlah terobosan untuk meningkatkan ekonomi daerahnya. Langkahnya dengan mengeluarkan kebijakan pro-rakyat yakni kebijakan “*Bela Beli Hasto Wardoyo*” dengan salah satu programnya program “*One Village One Sister Company*”.⁴ Hal ini merupakan *manivesto* dari berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah yaitu kabupaten/kota dan provinsi telah diberi kewenangan secara otonom untuk mengelola daerahnya dalam bidang pemerintahan.⁵

Kebijakan *Bela Beli* Kulonprogo merupakan kebijakan untuk mengajak masyarakat membangun perekonomian Kulonprogo dengan mengutamakan

³ Gideon, “Terorong Belanja Negara, Ekonomi RI Mampu Tumbuh 4,7% di 2015,” <http://bisnis.liputan6.com/read/2429728/terorong-belanja-negara-ekonomi-ri-mampu-tumbuh-47-di-2015>, akses pada tanggal 25-2-2016.

⁴ “Terobosan-Terobosan Bupati Kulonprogo” <http://www.tifafoundation.org/terobosan-terobosan-Bupati-kulon-progo/>, akses pada tanggal 25-2-2016.

⁵ Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah Pasal 10 Ayat (2).

produk sendiri dibandingkan produk asing. Sementara itu, salah satu programnya yaitu *One Village One Sister Company* adalah kerjasama antara desa dengan perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program *One Village One Sister Company* ini menggandeng 17 perusahaan swasta, BUMN⁶ dan BUMD⁷ untuk menjadi orang tua asuh dari desa-desa di Kulonprogo. Perusahaan yang menjadi orang tua asuh diharapkan dapat membina desa-desa yang menjadi asuhannya sehingga kesejahteraan di desa itu meningkat dan keluar dari angka kemiskinan. Program ini pertama kali diresmikan oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, pada bulan November 2012 di Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap.⁸

Kebijakan tersebut juga berhasil mendapatkan apresiasi berupa penghargaan dari Yayasan Damandiri⁹ dan Lembaga Ombudsman Swasta (LOS)¹⁰

⁶Menurut UU RI pasal 1 ayat (1) No.19 Tahun 2003, Pengertian BUMN adalah badan usaha yang seluruh maupun sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara dan digunakan untuk kepentingan negara, di mana melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang terpisahkan.

⁷Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah membentuk dan mengelola BUMD ditegaskan dalam pasal 177 Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom.

⁸ "Terobosan-Terobosan Bupati Kulonprogo" <http://www.tifafoundation.org/terobosan-terobosan-Bupati-kulon-progo/>, akses pada tanggal 25-2-2016.

⁹Damandiri adalah Yayasan Dana Sejahtera Mandiri atau disebut Yayasan Damandiri didirikan pada tanggal 15 Januari 1996 oleh HM Soeharto sebagai pribadi, yang kebetulan saat itu menjabat Presiden RI. Tujuan utama yayasan ini adalah membangun sumber daya manusia, utamanya dari keluarga kurang mampu, dengan menempatkan yayasan sebagai wadah bagi masyarakat untuk bergotong-royong mewujudkan tingkat kesejahteraan sejati dan taraf hidup mandiri. Modal awal Yayasan dihimpun dari sumbangan yang ikhlas dari wajib pajak yang berasal dari keuntungan setelah dipotong pajak untuk membantu mewujudkan keluarga sejahtera secara merata. <http://www.damandiri.or.id/index.php/main/profil>, akses pada tanggal 25-2-2016.

¹⁰Lembaga Ombudsman Swasta DIY adalah lembaga ombudsman swasta pertama di Indonesia yang dibentuk oleh Gubernur DIY dengan Surat Keputusan Gubernur 2004 dan diperkuat dengan Peraturan Gubernur DIY No. 22 tahun 2008. Lembaga Ombudsman Swasta

DIY di awal tahun ini. Damandiri Award dianugerahkan atas keberhasilan kabupaten menggerakkan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) dan kelompok-kelompok wirausaha di pedesaan. Cara yang dilakukan dengan melipatgandakan kelompok wirausaha yang terdiri dari orang miskin dalam Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB). Kemudian juga dari kepala daerahnya atau Bupati mendapatkan penghargaan LOS Award kategori Kepala Daerah diberikan atas upaya Pemkab menegakkan etika usaha sektor swasta di DIY. Pada kategori ini, penilaian dilakukan terhadap sejauh mana Pemkab memberikan kendali terhadap etika dalam berusaha antara investor, penanam modal dan pengusaha di Kulonprogo.¹¹

Melihat dari data di atas, tentang kebijakan *Bela Beli* Hasto Wardoyo. Penulis menjadi tertarik untuk meneliti kebijakan tersebut karena penulis ingin melihat apakah kebijakan *Bela Beli* Hasto Wardoyo merupakan strategi yang tepat dari pemerintah daerah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Kulonprogo ataukah kebijakan tersebut hanya akan melahirkan segelintir elit ekonomi yang mendapat keuntungan dari kebijakan yang dibuat, mengingat dalam islam tidak diperbolehkan hanya mementingkan sekelompok orang kaya saja. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-quran surah Al-Hasyr ayat 7 dan 9 yang berbunyi:

dibentuk untuk secara langsung membantu pemerintah dalam mendorong tegaknya tata kelola usaha oleh sektor swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY).

¹¹ “Terobosan-Terobosan Bupati Kulonprogo” <http://www.tifafoundation.org/terobosan-terobosan-Bupati-kulon-progo/>, akses pada tanggal 25-2-2016.

كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم¹²

ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون¹³

Selain dari itu beberapa tulisan mengatakan bahwa banyak pengusaha Indonesia yang lahir dan besar karena diuntungkan dari kebijakan pemerintah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penyusun membatasi permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimanakah dampak kebijakan *Bela Beli* Hasto Wardoyo bagi perekonomian masyarakat Kulonprogo?
2. Bagaimanakah kebijakan *Bela Beli* Hasto Wardoyo dalam perspektif nomokrasi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan dampak kebijakan *Bela Beli* Hasto Wardoyo dalam perekonomian masyarakat Kulonprogo.
- b. Untuk menjelaskan pandangan nomokrasi Islam dalam kebijakan *Bela Beli* Hasto Wardoyo.

¹² Al-hasyr (59): 7.

¹³ Al-hasyr (59): 9.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritik

- a. Sebagai referensi dalam kaitan pengembangan keilmuan politik pada umumnya dan kebijakan publik pada khususnya,
- b. Sebagai referensi dalam kaitan pengembangan keilmuan politik islam pada umumnya dan demokrasi Islam pada khususnya,
- c. Sebagai kontribusi keilmuan mengenai kebijakan publik pada tataran praksis.

2. Kegunaan Praktik

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Sebagai bahan untuk memperdalam teori-teori terkait kebijakan publik dan demokrasi Islam dalam aplikasinya di pemerintahan,
- 2) Diharapkan memberikan manfaat sebagai bahan telaah awal bagi akademisi guna memahami kontribusi penguasaan kebijakan publik,
- 3) Perwujudan mengembangkan pemikiran berdasarkan pada relasi antara efektifitas kebijakan dalam pemerintahan.

b. Bagi Masyarakat

- 1) Sebagai materi untuk memahami implementasi kebijakan bagi pengembangan keilmuan pemerintahan,
- 2) Sumbangsih manfaat bagi peningkatan daya kritis masyarakat dalam menanggapi berbagai kebijakan pemerintah.

c. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan masukan bagi pemerintah atau kepala pemerintahan agar dapat membuat kebijakan yang tidak mementingkan kelompok kecil sesuai dengan prinsip demokrasi Islam.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.¹⁴

Hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian berjudul “Kebijakan Bupati Aminuddin Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Probolinggo Perspektif Siyasah Maaliyah”. Penelitian ini ditulis oleh Achmad Hasani Al-Mubarrok dengan pokok masalah tentang bagaimana kebijakan Bupati Hasan Aminuddin dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Probolinggo. Untuk metode penelitian kebijakan ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), kemudian yang digunakan sebagai pisau analisa adalah teori *public policy* perspektif siyasah maaliyah. Temuan penelitian dari kebijakan Hasan Aminuddin adalah sangatlah tepat sasaran dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Probolinggo sehingga Bupati Hasan Aminuddin mampu merebut hati masyarakat dalam

¹⁴Tim Revisi Fakultas Syariah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa* (Yogyakarta: Fakultas Syaria'ah Press, 2009). hlm. 3-4.

pemilihan Bupati periode berikutnya.¹⁵ Letak perbedaan penelitian terletak pada lokasi dan kajian masalah yang mana penelitian sebelumnya meneliti tentang usaha-usaha Bupati aminuddin untuk meningkatkan perekonomian masyarakat probolinggo, namun penelitian yang akan ditulis lebih spesifikasi tentang satu kebijakan saja yang digunakan oleh Bupati Kulonprogo untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kulonprogo. Teorinya juga berbeda, di mana penelitian sebelumnya menggunakan teori kebijakan publik dan siyasah maaliyah namun penelitian yang akan ditulis menggunakan teori kebijakan publik dan nomokrasi Islam yang berisi tentang bagaimana dampak kebijakan *Bela Beli* Hasto Wardoyo di Kulonprogo.

Kedua, penelitian berjudul “Kebijakan Daerah Pemerintah Tuban dalam upaya mewujudkan *City Brand* Tuban kota Wali - *The Spirit of Harmoni*” oleh Hery Susanto. Ulasan peneliti menfokuskan pada, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Tuban dalam mewujudkan *city Brand* “Tuban kota Wali, dengan menggunakan metode peneitian lapangan (*Field Reasearch*). Hasil dari penelitian ini adalah komunikasi politik pemerintah yang dibangun melalui strategi city brand sebagai konsep pembangunan daerah merupakan langkah yang tepat. Dapat dikatakan tepat karena kebijakan *city brand* tersebut merupakan penguat dari kearifan lokal setempat dan wujud dari penerapan Undang-undang

¹⁵Ahmad Hasani Al-Mubarak, “Kebijakan Bupati Hasan Aminuddin Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Probbolinggo Perspektif Siyasah Maliyah”, skripsi sarjana strata satu Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014).

No. 32 Tahun 2004 pasal 14 ayat (2).¹⁶ Letak perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis adalah terletak pada jenis kebijakannya. Peneliti sebelumnya mengkaji upaya untuk mewujudkan *City Brand* atau nama julukan yang dijadikan sebagai *Brand* sebuah kota. Sedangkan penelitian yang akan ditulis akan meneliti kebijakan ekonomi dari kabupaten Kulonprogo dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat Kulonprogo.

Ketiga, skripsi yang dihasilkan oleh Rahadiyand Aditya berjudul “Dampak Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Produk Lokal: Studi Durian Menoreh Kuning Dan Jambon Serta Batik Motif Geblek Renteng Di Kabupaten Kulonprogo”. Penelitian ini membahas tentang hak kekayaan intelektual produk lokal kulo progo yaitu durian menoreh kuning dan jambon serta batik motif geblek yang mana bagian dari kebijakan *Bela Beli*. Metode yang digunakan adalah metode penelitian langsung (*field reasearch*). Penelitian ini menghasilkan bahwa Hak kekayaan intelektual produk lokal Kulonprogo berupa durian menoreh kuning dan jambon serta batik motif geblek sudah dikelola HAKInya.¹⁷ Di dalam data penelitian yang akan diteliti menyebutkan bahwa dalam kebijakan *Bela Beli* pemerintah mewajibkan untuk pakaian sekolah menggunakan bathik bermotif geblek sehingga terdapat hubungan dengan penelitian yang akan penulis teliti. Perbedaannya terletak pada

¹⁶Hery Susanto, “Kebijakan Daerah Pemerintah Tuban dalam upaya mewujudkan City Brand Tuban kota Wali - The Spirit of Harmoni”, skripsi sarjana strata satu Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015).

¹⁷Rahadiyand Aditya, “Dampak Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Produk Lokal: Studi Durian Menoreh Kuning Dan Jambon Serta Batik Motif Geblek Renteng Di Kabupaten Kulonprogo”, skripsi sarjana strata satu Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014).

kajiannya yakni untuk penelitian sebelumnya meneliti tentang HAKI produk lokal Kulonprogo sedangkan penelitian yang akan penulis teliti tentang kebijakan yang telah dibuat di Kulonprogo.

Keempat, penelitian Felix Arberd Nur Kristianto dengan mengusung judul “Partisipasi Masyarakat Kecamatan Kalibawang dalam Gerakan *Bela-Beli Kulonprogo*”. Jurnal ini memfokuskan penelitian pada partisipasi masyarakat Kalibawang dalam gerakan *Bela Beli Kulonprogo*. Metode yang digunakan dengan metode penelitian lapangan (*field reasearch*). Ulasan hasil penelitian menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat Kalibawang sudah ada namun kurang optimal.¹⁸ Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis tulis ialah terletak pada kajiannya. Peneliti sebelumnya meneliti tentang partisipasi masyarakat Kalibawang Kulonprogo, sedangkan yang akan penulis teliti mengenai dampak kebijakan *Bela Beli* itu sendiri.

Penelitian terakhir yang berjudul “Manajemen Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Manajemen Komunikasi Program *Bela Beli Kulonprogo*) di Kulonprogo, Yogyakarta)” tesis yang disusun oleh Ria harlinawati isinya menjelaskan tentang bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mensukseskan program *Bela Beli* Hasto Wardoyo . Dalam hasil penelitiannya diperoleh temuan komunikasi pemerintah Kulonprogo menerapkan metode manajemen komunikasi melalui empat langkah yakni mendefinisikan masalah, perencanaan komunikasi, aksi dan komunikasi, serta evaluasi komunikasi dalam sosialisasi program *Bela*

¹⁸Felix Arberd Nur Kristianto, “Partisipasi Masyarakat Kecamatan Kalibawang dalam Gerakan *Bela-Beli Kulonprogo*”, Jurnal ilmu-ilmu sosial, Vol. 12: 1 (Mei 2015).

Beli Hasto Wardoyo meskipun belum maksimal, sehingga hasil yang didapathanya maksimal pada efek kognitif, sedangkan efek afektif dan konatif masih jauh dari maksimal.¹⁹ Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis adalah terletak pada kajian masalahnya. Peneliti sebelumnya memfokuskan pada komunikasi dalam mensukseskan kebijakan *Bela Beli Hasto Wardoyo*. Namun penelitian yang akan diteliti oleh penulis meneliti tentang proses kebijakan tersebut dibuat hingga dampaknya bagi masyarakat.

F. Kerangka Teoritik

Studi kebijakan publik dalam konteks Indonesia menjadi semakin penting dan menarik jika dikaitkan dengan wacana otonomi daerah yang kini telah dijalankan. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut diharapkan akan memberi kesejahteraan kepada sebagian besar rakyat, namun di balik harapan tersebut juga diliputi rasa kekhawatiran. Otonomi dicemaskan akan melahirkan raja-raja kecil atau elit ekonomi di daerah yang tidak mempedulikan kesejahteraan rakyat.²⁰

Istilah kebijakan sebenarnya sudah sering terdengar, baik melalui kajian-kajian tertentu, diskusi organisasi ataupun berita dari media komunikasi. Namun masih banyak dari kalangan awam atau akademisi yang belum mengerti apa sebenarnya kebijakan itu. Apakah sebuah peraturan ataukah sebuah perilaku

¹⁹Ria harlinawati, "Manajemen Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Manajemen Komunikasi Program *Bela Beli Kulonprogo*) di Kulonprogo, Yogyakarta)", tesis pasca sarjana program studi ilmu komunikasi Universitas Gajah Mada Yogyakarta, (2014).

²⁰ Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: MedPress, 2007), hlm. 2-3.

pemerintah dalam menyikapi suatu masalah. Agar bisa mengkaji suatu kebijakan maka terlebih dahulu mengetahui arti dari kebijakan tersebut.

Menurut Charles O. Jones istilah kebijakan digunakan dalam praktek sehari-hari yaitu digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan, program, keputusan, *standard*, proposal, dan *grand design*. Namun secara umum istilah kebijakan digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor baik dalam organisasi ataupun kegiatan lain.²¹

Salah satu definisi kebijakan publik diutarakan oleh Robert Eyestone yaitu secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintahan dengan lingkungannya. Namun oleh James Anderson pengertian tersebut dipersempit lagi menjadi sebuah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.²²

Setelah mengetahui definisi kebijakan maka menjadi lebih mudah lagi untuk mengkaji suatu kebijakan. Disamping itu suatu kebijakan perlu adanya analisa kebijakan dan bila perlu setelah menganalisis diberikan sebuah anjuran kebijakan.²³ Namun dalam penelitian yang akan penulis teliti hanya sebatas analisis kebijakan, apakah kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Kulonprogo merupakan kebijakan yang tepat jika dilihat dari implementasinya.

²¹ *Ibid.*, hlm. 16.

²² *Ibid.*, hlm. 17-18.

²³ *Ibid.*, hlm. 30-32.

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan proses yaitu dengan perlunya mengetahui proses kebijakan tersebut dibuat atau tahap-tahap kebijakan tersebut dibuat. Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Tahap-tahap yang akan dipaparkan bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik, karena masih ada satu tahap lagi yaitu tahap perubahan kebijakan dan penghentian kebijakan. Tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

- a. Tahap penyusunan agenda,
- b. Formulasi kebijakan,
- c. Kebijakan publik,
- d. Implementasi kebijakan,
- e. Evaluasi kebijakan.²⁴



Gambar 1.1 : Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Di dalam Islam terdapat kajian yang membahas tentang politik yakni kajian siyasah. Secara harfiah siyasah berasal dari kata:

²⁴ *Ibid.*, hlm. 32-34.

ساس يسوس سياسة = دبر يدبر تدبيرا

“ Mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan”

Sedangkan secara harfiah pengertian siyasah berarti: pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan. Sedangkan secara istilah siyasah menurut ibn ‘aqil yaitu :

السياسة ماكان فعلا يكون معه الناس اقرب الي الصلاح وابتعد عن الفساد
وان لم يكون يشرعه الرسول ولا نزل به وحي.

“Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT. Tidak menentukannya.”²⁵

Dari pengertian di atas dapat diambil benang merah bahwasanya politik merupakan kegiatan yang mengatur suatu pemerintahan, yaitu bagaimana cara untuk mengatur sebuah masyarakat, bagaimana mengambil keputusan dan lain sebagainya. Kemudian jika berbicara mengenai pemerintahan maka tidak luput dari pembahasan akan negara, karena negara merupakan sebuah pijakan suatu pemerintahan. Sementara itu tokoh-tokoh dari kalangan Islam telah banyak yang mengkaji akan hal tersebut, salah satu tokoh yang terkemuka ialah Ibnu Kholdun.

Menurut Ibnu kholdun negara dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu negara kekuasaan alamiah (*mulk tabi'iy*) dan negara kekuasaan politik (*mulk siyasy*). Kekuasaan alamiah memiliki pengertian sebagai suatu kekuasaan yang sewenang-wenang dan cenderung memakai hukum rimba tanpa memedulikan

²⁵ Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, cet. Ke-3 (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2007), hlm.25-28.

keadilan. Sedangkan kekuasaan politik memiliki pengertian kebalikan dari kekuasaan alamiah. Kekuasaan politik oleh Ibnu Khaldun dibagi lagi menjadi tiga macam, yaitu: negara hukum Islam atau nomokrasi Islam, negara hukum sekuler, negara *a la* republik Plato.²⁶

Negara hukum Islam menjadikan syariah Islam menjadi fondasinya. Malcon H. Kerr dan Waqar Ahmad Husaini menyebutnya dengan nomokrasi Islam. Karakter dari nomokrasi Islam ialah memerankan dan memfungsikan Al-Qur'an, as-Sunnah dan akal manusia dalam kehidupan bernegara. Sedangkan negara hukum sekuler hanya mendasarkan pada hasil rasio manusia tanpa wahyu. Sementara negara *a la* republik Plato, merupakan negara yang diperintah oleh segelintir elit golongan atas golongan lain yang tidak memiliki hak pilih.²⁷

G. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang mempunyai arti jalan atau cara yang teratur dan sistematis untuk melaksanakan sesuatu, maka metode penelitian adalah cara kerja yang berdasarkan disiplin ilmu untuk mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta.²⁸

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field reasearch*) yang mana penulis terjun

²⁶ Muhammad, Nur, *NII(Negara Islam Indonesia) No NII (Negara Indonesia Islam) yes Pergulatan Konsep Negara Dalam Peradaban Islam Modern*, cet. Ke 1 (Yogyakarta: SUKA-Press Uin Sunan Kalijaga, 2011), hlm. 90.

²⁷ *Ibid.*, Hlm. 90.

²⁸ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1981), hlm. 16.

langsung pada peristiwa dimana data diperoleh dan dikumpulkan dari subjek dan orang-orang yang bersangkutan atau informan untuk menghasilkan gambaran yang terorganisir dengan baik dan lengkap.²⁹ Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah Bupati Kulonprogo yakni Hasto Wardoyo dan yang dijadikan obyek penelitian adalah kebijakan *Bela Beli*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan sifat deskriptif-analitis. Maksud dari Deskriptif-analitis adalah penelitian ini berusaha mendeskripsikan dan menguraikan semua persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang kemudian akan di analisis dengan menggunakan teori yang telah dikemukakan oleh para ahli.³⁰ Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan kebijakan *Bela Beli* yang telah dibuat oleh Bupati Kulonprogo kemudian akan dianalisis dengan teori yang telah dipilih oleh penulis.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh merupakan data yang berwujud kalimat-kalimat verbal dan biasanya merupakan dokumen pribadi, catatan laporan, upagara atau cerita

²⁹ Safidin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pusat Pelajar, 1999), hlm.8.

³⁰ Sukadarrumidi, *Metodologi Penelitian :Petunjuk Praktis Untuk Pemula*, Cet.ke-4, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 104.

responden dan lain-lain yang sejenis dengan itu.³¹ Sehingga penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara, yang dimaksud dengan wawancara adalah: metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Metode wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat informatif secara lisan dari sumber data yang akan digunakan. Bentuk interview yang penulis gunakan adalah dengan cara mengajukan pertanyaan kepada sumber data untuk memberikan jawaban berupa keterangan-keterangan dan cerita-cerita, ini dipakai guna memperoleh data tentang Kebijakan *Bela Beli* Hasto Wardoyo.³²

b. Dokumentasi, metode ini diperlukan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dan berhubungan dengan persoalan penelitian, juga digunakan untuk melengkapi data yang belum diperoleh melalui metode interview dan observasi.³³ Adapun metode dokumentasi ini diperlukan untuk mengumpulkan data antara lain : data pengusaha, data

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* Jilid II, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm. 136.

³² Tatang Amiri, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988), hlm. 135.

³³ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm.152.

angka kemiskinan dan lain-lain yang berkaitan dengan kebijakan *Bela Beli* Hasto Wardoyo.

4. Sumber Data

Sumber data ini terdiri atas dua bagian, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat oleh peneliti dengan cara langsung dari sumbernya. Data primer biasanya disebut dengan data asli atau data baru. Untuk memperoleh data primer, peneliti wajib mengumpulkannya secara langsung. Cara yang bisa digunakan peneliti untuk mencari data primer yaitu diskusi terfokus, wawancara langsung dengan Bupati Kulonprogo yang mengetahui kebijakan *Bela Beli* Hasto Wardoyo dan beberapa produsen di desa Hargorejo, Kokap, Kulonprogo sebagai sampel yang merasakan dampak kebijakan *Bela-Beli*. Penentuan sampel berdasarkan wilayah hingga terjaring 4 orang produsen yang terdapat di desa Hargorejo, kokap, Kulonprogo. Keempat samper tersebut yaitu produsen Bata Merah, produsen Genteng, produsen Gula Merah, produsen Gula Semut.

b. Data Sekunder

Data yang dapat diperoleh oleh peneliti dari semua sumber yang sudah ada atau pernah ditulis oleh orang lain. Misalnya jurnal, buku, laporan, website dan lain sebagainya. Dengan kata lain,

sumber data sekunder adalah data-data lain, yang terdapat dalam buku-buku atau dokumen lain yang secara tidak langsung berhubungan dengan kebijakan *Bela Beli* itu sendiri.³⁴

5. Analisis data

Setelah semua data terkumpul selanjutnya dilakukan analisis data. Data yang dikumpulkan tersebut dengan bentuk data kualitatif, oleh karena itu analisa yang digunakan adalah deskriptif maksudnya menyajikan penjelasan data yang diperoleh yang selanjutnya disajikan dalam bentuk kata-kata atau tulisan yang menggunakan bahasa dan logika sebagai analisisnya. Setelah dianalisis data yang telah dideskripsikan dan telah menjadi bagian bagian konseptual tersebut maka diambil pokok permasalahannya, kemudian dijadikan kesimpulan.³⁵

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama dijelaskan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

³⁴ Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif: komunikasi, ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, cet, ke-1 (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), hlm. 103-104.

³⁵ Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm.147.

Dalam bab kedua akan membahas lebih lanjut tentang teori yang digunakan sebagai pisau analisa kasus yaitu dengan menggunakan teori Kebijakan Publik dan teori Nomokrasi Islam.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum wilayah Kulonprogo, profil Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo dan menjelaskan mengenai kebijakan *Bela Beli* itu sendiri.

Bab keempat berisi tentang analisis penulis akan hasil temuan dengan berpijak pada bab-bab sebelumnya untuk memperjelas dan menjawab apa yang ada dalam rumusan masalah.

Bab penutup merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang di dalamnya berisi tentang kesimpulan penulisan yang diikuti dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan *Bela Beli* Kulonprogo adalah suatu kebijakan yang digunakan oleh Bupati Kulonprogo sebagai alat untuk mendorong agar masyarakat mau membela daerahnya sendiri dengan cara membeli produk yang diproduksi oleh masyarakat Kulonprogo. Secara umum penulis melihat dampak dari kebijakan *Bela Beli* berdampak positif. Hal ini dapat dilihat dari nilai PDRB Kulonprogo pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan sebesar 0,61 triliun rupiah dibandingkan dengan nilai PDRB tahun sebelumnya. Dan juga pada sektor industri mengalami laju pertumbuhan yang positif sebesar 7,37 persen pada tahun 2013 dan 2014. Laju pertumbuhan sektor ini didukung oleh peningkatan volume produksi maupun volume usaha. Pada tahun 2014, sektor ini menyumbang 12 persen terhadap total produk domestik regional bruto (PDRB) di Kabupaten Kulonprogo dengan nilai 870,12 miliar rupiah. Hal ini diperkuat dengan pemaparan beberapa produsen di desa Hargorejo, Kokap, Kulonprogo yaitu produsen bata merah, genteng, gula merah dan gula semut. Keempat produsen tersebut menyatakan bahwa kebijakan *Bela Beli* berdampak positif pada usahanya dengan meningkatkan penjualan.

Kebijakan *Bela Beli* dalam Nomokrasi Islam merupakan manivesto amanah yang di emban oleh Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo. Dalam perumusannya, dilakukan dengan cara musyawarah sesuai konsep Nomokrasi yaitu membahas tentang masalah serius yang sedang dialami oleh Kulonprogo

berupa masalah Kemiskinan. Kemudian kebijakan *Bela Beli* juga merupakan langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kulonprogo guna mensejahterakan masyarakatnya sesuai dengan tujuan dari konsep Nomokrasi Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah Kulonprogo agar kebijakan *Bela Beli* lebih mempunyai dampak yang positif lagi, di antaranya:

- a. Sosialisasi kebijakan *Bela Beli* lebih ditingkatkan lagi terutama difokuskan pada konsumen dari produk daerah.
- b. Penganjuran terhadap produk daerah kepada masyarakat atau kepada pemborong yang akan membangun sebuah rumah.
- c. Memberikan wadah tersendiri agar penjualan produk daerah lebih meningkat lagi.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah robbil'alam, segala puji syukur senantiasa penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah serta inayahNya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan, sehingga perlu adanya kritik dan saran yang mendukung dari berbagai pihak untuk penyusunan skripsi berikutnya supaya lebih baik. Semoga skripsi yang ditulis oleh penulis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung:
Gema Risalah Pres, t.t.

B. Fiqh

Djazuli, Fiqh Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm 210.

C. Buku lain

Amiri, Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988).

Azwar, Safidin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pusat Pelajar, 1999).

BPS Kabupaten Kulonprogo, *STATISTIK DAERAH KABUPATEN KULONPROGO 2015* (Kulonprogo: PT.Pohon Cahaya Yogyakarta, 2015).

Burhan, Bungin, *Penelitian Kualitatif: komunikasi, ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, cet, ke-1 (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007).

Dunn, William N., *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* edisi ke dua, alih bahasa Drs Samudra Wibawa, MMA, dkk, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998).

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Jilid II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994).

Idrus, *METODE PENELITIAN ILMU SOSIAL Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta: Erlangga, 2009).

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT.Gramedia, 1981).

Nugroho, *Public Policy* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2009).

Nur Muhammad, *NII(Negara Islam Indonesia) No NII (Negara Indonesia Islam) yes Pergulatan Konsep Negara Dalam Peradaban Islam Modern*, cet. Ke 1 (Yogyakarta: SUKA-Press Uin Sunan Kalijaga, 2011).

Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1995).

Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, Cet. Ke-4 (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2009).

Sukadarrumidi, *Metodologi Penelitian :Petunjuk Praktis Untuk Pemula*, Cet.ke-4, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012).

Tim Revisi Fakultas Syariah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009).

Widyahartono, *BELAJAR DARI JEPANG: Keberhasilan Sebagai Negara Industri Asia* (Jakarta: Salemba Empat, 2003).

Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: MedPress, 2007).

D. Karya Ilmiah

Ahmad Hasani Al-Mubarak, "Kebijakan Bupati Hasan Aminuddin Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Probbolinggo Perspektif Siyasah Maaliyah", skripsi sarjana strata satu Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014).

Felix Arberd Nur Kristianto, "Partisipasi Masyarakat Kecamatan Kalibawang dalam Gerakan Bela-Beli Kulon Progo", Jurnal ilmu-ilmu sosial, Vol. 12: 1 (Mei 2015).

Hery Susanto, "Kebijakan Daerah Pemerintah Tuban dalam upaya mewujudkan City Brand Tuban kota Wali - The Spirit of Harmoni", skripsi sarjana strata satu Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015).

Rahadiyand Aditya, "Dampak Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Produk Lokal: Studi Durian Menoreh Kuning Dan Jambon Serta Batik Motif Geblek Renteng Di Kabupaten Kulon Progo", skripsi sarjana strata satu Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014).

Ria harlinawati, "Manajemen Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Manajemen Komunikasi Program Bela dan Beli Kulon Progo) di Kulon Progo, Yogyakarta)", tesis pasca sarjana program studi ilmu komunikasi Universitas Gajah Mada Yogyakarta, (2014).

E. Undang-Undang Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) No.19 Tahun 2003.

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 177 No. 32 Tahun 2004.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah Pasal 10 Ayat (2).

F. Lain-lain:

Air mineral lokal airku milik PDAM
<http://www.harianjogja.com/baca/2015/11/25/air-mineral-lokal-airku-milik-pdam-kulonprogo-makin-laris-664540>, Diakses pada tanggal 26 Mei 2016.

Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2015 tumbuh 5,04 persen tertinggi selama tahun 2015, <http://www.bps.go.id/index.php/brs/1267>, akses pada tanggal 25-2-2016.

Gideon, "Terorong Belanja Negara, Ekonomi RI Mampu Tumbuh 4,7% di 2015," <http://bisnis.liputan6.com/read/2429728/terorong-belanjanegaraekonomi-ri-mampu-tumbuh-47-di-2015>, akses pada tanggal 25-2-2016.

Penghargaan, http://www.kulonprogokab.go.id/v21/penghargaan-kabupaten-kulon-progo_229_hal Diakses pada tanggal 20-05-2016

Profil Bupati Kulonprogo, http://www.kulonprogokab.go.id/v21/profil-bupati-kulon-progo_227_hal Diakses pada tanggal 20-05-2016

Profil Damandiri, <http://www.damandiri.or.id/index.php/main/profil>, akses pada tanggal 25-2-2016.

Sejarah Bulog, <http://www.bulog.co.id/sejarah.php> Diakses pada tanggal 26 Mei 2016.

Sekilas Raskin, http://www.bulog.co.id/sekilas_raskin.php Diakses pada tanggal 26 Mei 2016.

Terobosan-Terobosan Bupati Kulonprogo, <http://www.tifafoundation.org/terobosan-terobosan-bupati-kulon-progo/>, akses pada tanggal 25-2-2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	BAB	FN	SURAH AL- QURAN	TERJEMAHAN
1	5	I	13	Al-hasyr (59): 7.	<i>Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu</i>
2	5	I	14	Al-hasyr (59): 9.	<i>Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung</i>
3	39	II		Asy-Syura (42): 38	<i>Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.</i>
4	41	II		An-Nisa (4): 135.	<i>Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.</i>



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

mat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281



Pedoman wawancara

Narasumber: Bupati Kulonprogo.

1. Apa yang dimaksud dengan kebijakan Bela Dan Beli Kulonprogo ?
2. Apa tujuan dari dikeluarkannya kebijakan Bela Dan Beli Kulonprogo?
3. Apa yang melatarbelakangi munculnya kebijakan Bela Dan Beli Kulonprogo?
4. Bagaimanakah proses terbentuknya kebijakan Bela Dan Beli Kulonprogo?
5. Langkah apa saja yang dilakukan guna menjalankan kebijakan Bela Dan Beli Kulonprogo?
6. Kapan Kebijakan Bela dan Beli Kulonprogo mulai di implementasikan?
7. Sejauh ini bagaimana implementasi dari kebijakan Bela Dan Beli Kulonprogo? Apakah sudah memenuhi target yang diharapkan?
8. Siapa sajakah yang ikut andil dalam implementasi Kebijakan Bela Dan Beli? Apakah semua masyarakat Kulonprogo atau hanya pemerintah dan beberapa perusahaan saja dalam hal produksi?



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

mat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281



Pedoman wawancara

Narasumber: Produsen Bata Merah, Genteng, Gula Merah, Gula Semut.

1. Usaha apa yang sedang anda jalankan?
2. Sudah berapa lama usaha yang anda jalankan?
3. Apakah ada sumbangsih dari pemerintah terhadap usaha anda?
4. Untuk pemerintahan sekarang terdapat kebijakan Bela dan Beli dari pemerintah Kulonprogo, apakah kebijakan tersebut berpengaruh terhadap usaha yang anda jalankan?
5. Menurut anda, apakah sudah tepat kebijakan Bela dan Beli Kulonprogo tersebut?

Trankrip wawancara

Narasumber : dr.H. Hasto Wardoyo,Sp.OG(K)
 Sebagai : Bupati Kulonprogo
 Tempat : Rumah Dinas Bupati Kulonprogo
 Waktu :07.00—07.30

1. Apa yang dimaksud dengan kebijakan *Bela Dan Beli Kulonprogo* ?

Kebijakan Bela Beli itu adalah kebijakan untuk mendorong agar warga masyarakat mau membela daerahnya dengan cara membeli produk-produknya sendiri dan dengan cara menguasai pasarnya sendiri, jangan diserahkan kepada pasar asing. Sebenarnya apa-apa yang sudah bisa dikuasai sendiri dan bisa dibuat sendiri itu mbok kalo bisa dikuasai sendiri dan dibeli sendiri ya syukur kalo bisa menjual kepada orang lain. Tapi paling tidak belalah kabupaten ini dengan cara membeli produk-produk sendiri.

2. Apa tujuan dari dikeluarkannya kebijakan *Bela Dan Beli Kulonprogo*?

Tujuan mendasarnya ialah Mengentaskan kemiskinan agar uang itu lebih banyak beredar di daerah sehingga kemiskinan lebih cepat diatasi. Yang kedua ialah berhemat, dalam artian karena masyarakat masih banyak dalam keadaan miskin maka harus banyak berhemat yaitu tidak menjadi masyarakat yang konsumtif dengan produk asing. Yang ketiga ialah mengantisipasi adanya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Dengan ada MEA secara otomatis persaingan ekonomi tidak cuma cangkupan skala nasional, akan tetapi bersaing dengan produksi dari luar negeri. Yang keempat adalah melatih dan menumbuhkan jiwa Patriotisme dan jiwa Nasionalisme saya kira itu.

3. Apa yang melatarbelakangi munculnya kebijakan *Bela Dan Beli Kulonprogo*?

Latar belakang terbentuknya kebijakan *Bela Beli Kulonprogo* adalah masih banyaknya Kemiskinan Jika masih banyak kemiskinan solusinya adalah meningkatkan pendapatan atau mengurangi pengeluaran atau keduanya. Caranya yaitu dengan meningkatkan pendapatan masyarakat Kulonprogo dan mengurangi pengeluaran masyarakat Kulonprogo. Kemudian mucullah sebuah gagasan yang berupa cara mencegah agar uang tidak keluar dan tetap dalam masyarakat Kulonprogo, maka dibuatlah kebijakan *Bela Beli*.

4. Bagaimanakah proses terbentuknya kebijakan *Bela Dan Beli Kulonprogo*?

Ya sebetulnya prosesnya dari Diskusi, *brainstorming* membahas tentang masalah yang sedang dialami oleh Kulonprogo yaitu masalah Kemiskinan. menjadi masalah yang serius karena masalah kemiskinan ini menurut album kemiskinan yang telah dibuat oleh kami sudah pada masalah yang serius. Setelah mengadakan diskusi dan mencerna data yang ada, dibutuhkan sebuah ideologi yang mampu untuk mengurangi masalah kemiskinan. Maka muncul sebuah gagasan atau ideologi yang berupa Bela atau membela. Membela di sini mempunyai arti membela daerahnya sendiri dengan cara memproduksi sendiri. Setelah itu mengkristal jadilah sebuah kebijakan yaitu kebijakan Bela-Beli. Ini juga terinspirasi dengan gerakan Beli Indonesia. Oleh kami ditambahi Bela dan terbentuklah sebuah kebijakan *Bela Beli Kulonprogo*.

5. Langkah apa saja yang dilakukan guna menjalankan kebijakan *Bela Dan Beli Kulonprogo*?

Pertama dengan filosofi Memulai sesuatu dari yang kecil. Maksudnya ialah memulai program yang sederhana, mudah dan bisa dilakukan tidak dengan program yang besar namun sulit untuk dijalankan seperti pembuatan alat elektronik atau kecanggihan teknologi lainnya. Filosofi ini juga sebenarnya sudah diajarkan oleh guru-guru ketika menasehati kepada muridnya untuk mengerjakan soal yang mudah dalam sebuah ujian. Pertama dengan memproduksi Air kemasan. Pertanyaannya Apa yang bisa dibuat oleh kita? Masa iya soal air juga kita tergantung dengan produk asing? Maka kami membuat Air Kulonprogo dibuat PDAM yang mana untungnya untuk rakyat. Ini adalah contoh sederhana. Implementasi yang kedua adalah dengan menggunakan beras daerah dalam yaitu menerima Raskin namun diganti dengan Rasda (Beras daerah). Beras daerah ini merupakan beras asli dari masyarakat Kulonprogo. Kemudian melalui pemerintah dialokasikan kepada orang miskin dengan adanya perjanjian MOU dengan Bulog yang berisikan bahwa beras Raskin yang sebelumnya diimpor dari Vietnam untuk Kabupaten Kulonprogo menggunakan beras dari masyarakat Kulonprogo sendiri. Kenapa memilih Beras karena kita memproduksi beras banyak. Kemudian Penggunaan produk batik daerah Jumlah siswa yang ada di Kulonprogo sekitar 80 ribu siswa SD, SMP, SMA dan PAUD di Kulonprogo. Jika semua siswa serta mengenakan seragam batik produksi luar Kulonprogo, maka keuntungan akan jatuh pada perusahaan daerah lain atau perusahaan batik luar negeri yaitu batik cap dari china. Berapa milyar uang yang bisa dihemat biar uang tidak dinikmati orang asing. Kuasailah pasar sendiri kemudian Penggunaan batu andesit Kulonprogo. Batu ini digunakan oleh pemerintah kulonprogo sebagai hiasan pada halaman kantor DPRD Kulonprogo. Yang keuntungannya dinikmati oleh rakyat.

6. Kapan Kebijakan *Bela dan Beli Kulonprogo* mulai di implementasikan?

Beras 2012 sudah diurus dan setelah Mou dengan Bulog mulai 2013, AirKu juga Desember baru 2013, batik 2012 pertengahan, Batu andesit juga tahun 2013. Rata-rata semua sudah berlangsung setelah kebijakan *Bela Beli* di deklarasikan.

7. Sejauh ini bagaimana implementasi dari kebijakan *Bela Dan Beli Kulonprogo*? Apakah sudah memenuhi target yang diharapkan?

Belom, produksi harus diperbanyak.

8. Siapa sajakah yang ikut andil dalam implementasi *Kebijakan Bela Dan Beli*? Apakah semua masyarakat Kulonprogo atau hanya pemerintah dan beberapa perusahaan saja dalam hal produksi?

Utamanya SKPD yang membantu, rakyat (petani dan pengrajin), BUMD.

Trankrip wawancara

Narasumber : Bapak Ehsan Mawardi
Sebagai : Produsen Bata merah
Tempat : Rumah kediaman di dusun Selo Timur, Hargorejo
Waktu : 14.00-14.30 WIB

1. Usaha apa yang sedang anda jalankan?

Pengrajin bata merah nanti ada batako, berarti pengrajin dan produksi lah.

2. Sudah berapa lama usaha yang anda jalankan?

Kurang lebih 15 tahun.

3. Apakah ada sumbangsih dari pemerintah terhadap usaha anda?

Belom ada. Kalo usaha kami itu sendiri, mandiri. Kalo koperasi ada mas. Tapi kami tidak ikut. Kalo di sini ada di bawah naungan duaafa.

4. Untuk pemerintahan sekarang terdapat kebijakan Bela dan Beli dari pemerintah Kulonprogo, apakah kebijakan tersebut berpengaruh terhadap usaha yang anda jalankan?

Sebelumnya menurut saya Kebijakan *Bela Beli* adalah orang Kulonprogo seharusnya memakai produk Kulonprogo. Membantu kelancaran produksi. Buktinya tidak ada bata numpuk. Kalo memang semua mengerti arti *Bela-Beli* akan lancar terus. Pembeli kami kebanyakan dari masyarakat Kulonprogo.

5. Menurut anda, apakah sudah tepat kebijakan Bela dan Beli Kulonprogo tersebut?

Sudah tepat mas.

Trankrip wawancara

Narasumber : Bapak Sudiono
Sebagai : Produsen Genteng
Tempat : Rumah kediaman di dusun Selo Barat, Hargorejo
Waktu : 16.30-17.15 WIB

1. **Usaha apa yang sedang anda jalankan?**
Pembuatan genteng, pengrajin genteng. Produksi genteng
2. **Sudah berapa lama usaha yang anda jalankan?**
Sejak 97 sudah lama, sudah 19 tahun berjalan.
3. **Apakah ada sumbangsih dari pemerintah terhadap usaha anda?**
Banyak, dari bupati dulu diberi alat cetak. Untuk pemerintahan yang sekarang diberi binaan. Supaya kualitas diperbaiki, ditingkatkan. Intinya membina lah.
4. **Untuk pemerintahan sekarang terdapat kebijakan *Bela Beli* dari pemerintah Kulonprogo, apakah kebijakan tersebut berpengaruh terhadap usaha yang anda jalankan?**
Maksudnya sedapat mungkin diproduksi kulonprogo, sedikit banyak ada pengaruh tapi belum maksimal. Menurut anjuran pak Bupati kan menganjurkan produksi Kulonprogo. Namun belum semua menyadari.
5. **Menurut anda, apakah sudah tepat kebijakan *Bela Beli* Kulonprogo tersebut?**
Sudah tepat.

Trankrip wawancara

Narasumber : Bapak Marhaban
Sebagai : Produsen Gula Merah
Tempat : Rumah kediaman di dusun Tejogan, Hargorejo
Waktu : 19.30-20.00 WIB

1. **Usaha apa yang sedang anda jalankan?**
Gula Merah
2. **Sudah berapa lama usaha yang anda jalankan?**
Sudah lama, sebelum nikah saya sudah menjalani usaha ini. Sekitar tahun 80an, tepatnya tahun 1985. Kurang lebih 25 tahun lah.
3. **Apakah ada sumbangsih dari pemerintah terhadap usaha anda?**
Ada berupa sabuk pengaman tapi dari bupati sebelum pak Hasto. Kalo dari bupati sekarang orang-orang dikumpulkan di balai desa. Trus diberi alat deres dan sabuk.
4. **Untuk pemerintahan sekarang terdapat kebijakan *Bela Beli* dari pemerintah Kulonprogo, apakah kebijakan tersebut berpengaruh terhadap usaha yang anda jalankan?**
Tidak ada pengaruh dalam penjualan, soalnya saya lewat distributor. Tapi pada kepemimpinan pak Hasto diusahakan dijual sendiri.
5. **Menurut anda, apakah sudah tepat kebijakan *Bela Beli* Kulonprogo tersebut?**
Belum bisa menilai tepat atau tidak mas.

Trankrip wawancara

Narasumber : Bapak Sukiran
Sebagai : Produsen Gula Semut
Tempat : Rumah kediaman di dusun Selo Barat, Hargorejo
Waktu : 20.00-21.00

1. **Usaha apa yang sedang anda jalankan?**
Gula semut.
2. **Sudah berapa lama usaha yang anda jalankan?**
Sudah 13 tahun mas.
3. **Apakah ada sumbangsih dari pemerintah terhadap usaha anda?**
Ada, dari perindag berupa bantuan alat produksi dan juga binaan. Semua itu baru-baru ini.
4. **Untuk pemerintahan sekarang terdapat kebijakan Bela dan Beli dari pemerintah Kulonprogo, apakah kebijakan tersebut berpengaruh terhadap usaha yang anda jalankan?**
Berpengaruh penjualan meningkat.
5. **Menurut anda, apakah sudah tepat kebijakan Bela dan Beli Kulonprogo tersebut?**
Sudah tepat.

DOKUMENTASI

1. Penulis bersama Bupati Kulonprogo bapak dr. H. HASTO WARDOYO, Sp.OG (K)



2. Penulis bersama Produsen Genteng bapak Sudiono



3. Penulis bersama Produsen Bata Merah bapak Ihsan Mawardi



4. Penulis bersama Produsen Gula Semut bapak Sukiran



5. Penulis bersama Produsen Gula Merah bapak Marhaban.



**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA
PENGAMBILAN DATA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. H. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K)

Jabatan : Bupati Kulonprogo

Menerangkan bahwa:

Nama : Much. Kaotsar Asshofi

Jurusan : Siyasah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan penyusunan skripsi yang berjudul **"KEBIJAKAN BELA BELI BUPATI HASTO WARDOYO PERSPEKTIF NOMOKRASI ISLAM"**.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kulonprogo, 23 Mei 2016



dr. H. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K)
(Narasumber)

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA
PENGAMBILAN DATA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *ENSAN MAWARDI*
Pekerjaan : *PRODUSEN BATA MERAH SELU TIMUR*

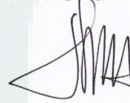
Menerangkan bahwa:

Nama : Much. Kaotsar Asshofi
Jurusan : Siyasah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan penyusunan skripsi yang berjudul **"KEBIJAKAN BELA BELI BUPATI HASTO WARDOYO PERSPEKTIF NOMOKRASI ISLAM"**.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kulonprogo, 03 Mei 2016



(Narasumber)

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA
PENGAMBILAN DATA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marhaban
Pekerjaan : Bula Merah, Tegogan

Menerangkan bahwa:

Nama : Much. Kaotsar Asshofi
Jurusan : Siyasah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Uiniversitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan penyusunan skripsi yang berjudul **"KEBIJAKAN BELA BELI BUPATI HASTO WARDOYO PERSPEKTIF NOMOKRASI ISLAM"**.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kulonprogo, 03 Mei 2016



(Narasumber)

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA
PENGAMBILAN DATA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sudiono
Pekerjaan : Produsen genteng, Selo Barat

Menerangkan bahwa:

Nama : Much. Kaotsar Asshofi
Jurusan : Siyasah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Uiniversitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan penyusunan skripsi yang berjudul **"KEBIJAKAN BELA BELI BUPATI HASTO WARDOYO PERSPEKTIF NOMOKRASI ISLAM"**.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kulonprogo, 03 Mei 2016

Sudi
(Sudiyono)

(Narasumber)

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA
PENGAMBILAN DATA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukiran
Pekerjaan : Produsen Gula Semut, Gunung Kukusan

Menerangkan bahwa:

Nama : Much. Kaotsar Asshofi
Jurusan : Siyasah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan penyusunan skripsi yang berjudul **"KEBIJAKAN BELA BELI BUPATI HASTO WARDOYO PERSPEKTIF NOMOKRASI ISLAM"**.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kulonprogo, 03 Mei 2016



Sukiran,

(Narasumber)



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/...../2016
Lamp : Proposal Skripsi
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 13 April 2016

Kepada Yth.
Gubernur Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta
c.q. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	Jurusan
1.	Much. Kaotsar Asshofi	12370013	Siyasah

Untuk mengadakan pra penelitian di Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis (skripsi) yang berjudul *KEBIJAKAN BELA DAN BELI* BUPATI KULONPROGO HASTO WARDoyo PERSPEKTIF NOMOKRASI ISLAM

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/2016
Lamp : Proposal Skripsi
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 13 April 2016

Kepada Yth.
Bupati Kulonprogo
c.q. Kepala BPMPT Kabupaten Kulonprogo
di. Kulonprogo

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	MUCH. KAOTSAR ASSHOFI	12370013	SIYASAH

Untuk mengadakan pra penelitian di Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis (skripsi) yang berjudul *KEBIJAKAN BELA DAN BELI* BUPATI KULONPROGO HASTO WARDOYO PERSPEKTIF NOMOKRASI ISLAM

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samudri Hadi, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003 6

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/v/755/4/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/917/2016**
FAK. SYARIAH DAN HUKUM
 Tanggal : **13 APRIL 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **MUCH. KAOTSAR ASSHOFI** NIP/NIM : **12370013**
 Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, SIYASAH, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
 Judul : **KEBIJAKAN BELA DAN BELI BUPATI KULONPROGO HASTO WARDOYO PERSPEKTIF NOMOKRASI ISLAM**
 Lokasi :
 Waktu : **27 APRIL 2016 s/d 27 JULI 2016**

Dengan Ketentuan

- Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
- Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjapro.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
- Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
- Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjapro.go.id;
- Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
 Pada tanggal **27 APRIL 2016**
 A.n Sekretaris Daerah
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 Ub.
 Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI KULON PROGO C.Q KPT KULON PROGO
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
 Unit 1: Jl. Perwakilan No. 1, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 775208 Kode Pos 55611
 Unit 2: Jl. KHA Dahlan, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 774402 Kode Pos 55611
 Website: bpmpt.kulonprogokab.go.id Email : bpmpt@kulonprogokab.go.id

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070.2 /00448/IV/2016

Memperhatikan : Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi DIY Nomor: 070/REG/V/755/4/2016, TANGGAL 27 APRIL 2016, PERIHAL ; IZIN PENELITIAN

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
 2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
 4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 73 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu..

Diizinkan kepada : MUCH KAOTSAR ASSHOFI
 NIM / NIP : 12370013
 PT/Instansi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
 Keperluan : IZIN PENELITIAN
 Judul/Tema : KEBIJAKAN BELA DAN BELI BUPATI KULON PROGO HASTO WARDOYO PERSPEKTIF NOMOKRASI ISLAM

Lokasi : PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Waktu : 27 April 2016 s/d 27 Juli 2016

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peneliti
6. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
7. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ditetapkan di : Wates
 Pada Tanggal : 29 April 2016


KEPALA
BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU
ACUNG KURNIAWAN, S.I.P., M.Si
 Pembina Tk.I ; IV/b
 NIP. 19680805 199603 1 005

Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Kulon Progo (Sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
3. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
5. Kepala BPS Kab. Kulon Progo
6. Camat Kokap Kab. Kulon Progo
7. Kepala Desa Hargorejo Kokap Kulon Progo
8. Kelompok Kerajinan.....
9. Yang bersangkutan
10. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281



Yogyakarta, 3 Mei 2016

No. : UIN.01/DS.1/PP.00.9/2016
Lamp : Proposal Skripsi
Hal : Permohonan Penelitian
Kepada Yth.

.....
Di Tempat

Dengan Hormat

Kami dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak sebagai Informan dalam penelitian mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Much. Kaotsar Asshofi

NIM : 12370013

Studi : Siyasah

Judul Penelitian : Kebijakan *Bela dan Beli* Bupati Kulonprogo Hasto wardoyo perspektif Nomokrasi Islam

Pelaksanaan Penelitian Skripsi mahasiswa/mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh instansi/perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,
Ketua Jurusan Siyasah
UIN Sunan Kalijaga

DR. H. M. NUR, S.AG., M.AG
NIP. 19700816 199703 1 002

CURRICULUM VITAE

A. DATA DIRI

Nama : Much. Kaotsar Asshofi
Tempat dan Tanggal lahir : Banjarnegara, 14 Agustus 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Rt 02 Rw 08 Parakancangah, Kec.
Banjarnegara, Kab. Banjarnegara

B. PENDIDIKAN

1. 2000-2006 : SD Negeri 1 Parakancangah, Banjarnegara, Jawa Tengah
2. 2006-2009 : SMP Negeri 1 Mojo, Kediri, Jawa Timur
3. 2009-2012 : SMA Negeri 1 Mojo, Kediri, Jawa Timur
4. 2012-2016 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, 01 Juni 2016

Much. Kaotsar Asshofi
NIM: 12370013